Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 35345-35357

Peran QRIS dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Stabilitas Ekonomi Makro

Ratnadewi Nisya Aryanti[1], Zhafira Allayda[2], Suhaiba Aslammiah[3], Charla Nurul Azzahra[4], Aprilia Anggun Zulfiani[5], Ahmad Setiawan Nuraya[6]

[1,2,3,4,5,6] **Program Studi Manajemen, Indonesia Banking School**

*Email: : ratnadewi.20241111075@ibs.ac.id; zhafira.20241111072@ibs.ac.id; suhaiba.20241111098@ibs.ac.id; charla.20241111083@ibs.ac.id; aprilia.20251111001@ibs.ac.id; ahmad.nuraya@ibs.ac.id
Corresponding Author: Ratnadewi Nisya Aryanti, ratnadewi.20241111075@ibs.ac.id

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengkaji kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi makro. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur sistematis dan analisis data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, World Bank, dan International Monetary Fund, mencakup periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS telah mencatat pertumbuhan signifikan dengan 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant pada 6 bulan pertama 2025, di mana 93,16% merupakan pelaku UMKM. QRIS terbukti memperluas akses keuangan formal, menciptakan profil kredit digital bagi UMKM yang sebelumnya tidak bankable, mempercepat perputaran uang, serta menekan aktivitas ekonomi bayangan melalui transparansi transaksi. Di level makroekonomi, data transaksi real-time QRIS memperkuat efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia. Namun, kesenjangan infrastruktur digital antara perkotaan dan daerah tertinggal, rendahnya literasi keuangan, serta meningkatnya risiko kejahatan siber masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan kebijakan afirmatif dan kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: *QRIS, Inklusi Keuangan, UMKM, Ekonomi Digital, Stabilitas Makroekonomi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in promoting financial inclusion among Indonesian society, particularly micro, small, and medium enterprises (MSMEs), while examining its contribution to macroeconomic stability. A qualitative descriptive method was employed through systematic literature review and secondary data analysis from Bank Indonesia, the Central Bureau of Statistics, the Financial Services Authority, the World Bank, and the International Monetary Fund, covering the period 2020–2025. The findings indicate that QRIS has recorded significant growth with 57 million users and 39.3 million merchants in the first half of 2025, of which 93.16% are MSME actors. QRIS has proven effective in expanding access to the formal financial ecosystem, creating digital credit profiles for previously unbankable MSMEs, accelerating money velocity, and suppressing shadow economy activities through transaction transparency. At the macroeconomic level, real-time QRIS transaction data strengthens the effectiveness of Bank Indonesia's monetary policy. Nevertheless, the digital infrastructure gap between urban and remote areas, low financial literacy, and increasing cybercrime risks remain structural challenges requiring affirmative policies and cross-sector collaboration.

Keywords: *QRIS, Financial Inclusion, MSME, Digital Economy, Macroeconomic Stability*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Arus digitalisasi yang terus berkembang telah merevolusi cara masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, menggeser paradigma konvensional menuju ekosistem nontunai yang lebih efisien. Dalam konteks ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai respons strategis terhadap fragmentasi

sistem pembayaran digital. QRIS dikembangkan untuk memungkinkan transaksi berbasis QR Code yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH). Melalui prinsip interoperabilitas, QRIS menyatukan berbagai instrumen pembayaran dalam satu kode universal, sehingga *merchant* hanya perlu menyediakan satu kode QR untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi, baik melalui *Merchant-Presented Mode* maupun *Customer-Presented Mode*.

Kehadiran QRIS juga erat kaitannya dengan upaya peningkatan inklusi keuangan nasional. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan transaksi tunai yang memiliki berbagai keterbatasan, seperti risiko kehilangan, keterbatasan pencatatan keuangan, serta rendahnya akses terhadap pembiayaan formal. Dalam hal ini, QRIS menawarkan solusi yang terjangkau karena hanya memerlukan perangkat ponsel pintar dengan koneksi internet, tanpa investasi besar pada perangkat *Point of Sale*. Data menunjukkan bahwa hingga Semester I tahun 2025, pengguna QRIS telah mencapai 57 juta dengan 39,3 juta *merchant*, di mana 93,16% di antaranya merupakan UMKM, serta mencatatkan 6,05 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp579 triliun (Bank Indonesia, 2025).

Menurut Schumpeter (1934), inovasi dalam sistem ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transformasi teknologi. Pandangan tersebut relevan dengan perkembangan sistem pembayaran digital yang menghadirkan perubahan mendasar dalam pola transaksi masyarakat. Rogers (2003) melalui teori *Diffusion of Innovation* menjelaskan bahwa penerimaan teknologi baru dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, manfaat, kompatibilitas, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap inovasi tersebut. Dalam konteks QRIS, kemudahan akses dan efisiensi transaksi menjadi faktor utama yang mendorong percepatan adopsi di berbagai sektor usaha, khususnya UMKM.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi. World Bank (2022) menyatakan bahwa pembayaran digital dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi kelompok *unbanked* dan pelaku usaha mikro. Sejalan dengan itu, International Monetary Fund (2023) menjelaskan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital berkontribusi terhadap peningkatan transparansi ekonomi, percepatan transaksi, serta efektivitas kebijakan moneter melalui peningkatan sirkulasi uang digital dalam perekonomian.

Menurut Mankiw (2018), efisiensi sistem pembayaran akan memengaruhi kecepatan perputaran uang (*velocity of money*) yang pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas ekonomi makro. Sementara itu, Mishkin (2019) menegaskan bahwa modernisasi sistem pembayaran digital mampu memperkuat transmisi kebijakan moneter karena transaksi menjadi lebih tercatat, transparan, dan mudah dipantau oleh otoritas keuangan. Selain itu, Todaro dan Smith (2020) menyebutkan bahwa inklusi keuangan berbasis teknologi memiliki pengaruh terhadap peningkatan produktivitas masyarakat serta pengurangan kesenjangan ekonomi, khususnya di negara berkembang.

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Lestari dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa penggunaan QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi UMKM karena proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan aman dibandingkan transaksi tunai. Penelitian lain oleh Pratama et al. (2023) mengungkapkan bahwa implementasi QRIS membantu pelaku usaha dalam pencatatan keuangan digital sehingga mempermudah pengelolaan arus kas dan akses pembiayaan formal. Selain itu, penelitian oleh Sari dan Nugroho (2024) menemukan bahwa adopsi QRIS berpengaruh terhadap peningkatan literasi keuangan digital masyarakat serta memperluas penggunaan layanan perbankan digital di daerah perkotaan maupun semi perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunshine K.F. Lintang et al. (2025), implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada pelaku UMKM di Kota Manado memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses transaksi. Penggunaan QRIS mempermudah aktivitas pembayaran karena bersifat praktis, cepat, dan terintegrasi, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Selain itu, QRIS juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital serta meningkatkan perputaran uang dalam perekonomian lokal.

Namun demikian, pengaruh penggunaan QRIS terhadap peningkatan kinerja UMKM, khususnya dalam aspek pendapatan dan skala produksi, belum menunjukkan hasil yang signifikan secara merata. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik lokasi usaha, preferensi konsumen, serta tingkat adopsi teknologi di masing-masing pelaku UMKM. Di samping itu, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi QRIS, seperti rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku usaha dan masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti akses jaringan internet yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi digital, serta penguatan infrastruktur guna mengoptimalkan pemanfaatan QRIS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan QRIS tidak hanya berdampak pada efisiensi transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen karena sistem pembayaran dianggap lebih modern dan aman. Sementara itu, penelitian oleh Putri dan Kurniawan (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi pembayaran melalui QRIS mampu mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) dan meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital. Penelitian oleh Wijaya (2024) juga menyatakan bahwa perkembangan pembayaran digital berpotensi mengurangi aktivitas *shadow economy* karena transaksi menjadi lebih terdokumentasi dan mudah diawasi oleh otoritas keuangan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut menunjukkan dampak positif QRIS terhadap sektor mikro, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek operasional dan peningkatan pendapatan UMKM. Di sisi lain, kajian yang mengaitkan implementasi QRIS dengan variabel makroekonomi masih relatif terbatas. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis bagaimana QRIS memengaruhi perputaran uang (*velocity of money*), efektivitas kebijakan moneter, pengurangan *shadow economy*, serta stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara kajian mikro dan implikasi makro dari digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, khususnya pada periode pasca pandemi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis mikro dan makro dalam melihat peran QRIS, tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai infrastruktur ekonomi digital yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami kontribusi QRIS terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran QRIS dalam mendorong inklusi keuangan serta bagaimana kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran QRIS dalam meningkatkan inklusi keuangan, mengeksplorasi kontribusinya terhadap efisiensi ekonomi dan stabilitas makro, serta mengidentifikasi tantangan implementasi dan rekomendasi kebijakan yang relevan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami peran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mendorong inklusi keuangan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan karena mampu menjelaskan fenomena secara sistematis dan menyeluruh melalui studi literatur serta analisis kebijakan tanpa menggunakan perhitungan statistik yang kompleks (Muspawi, 2024). Sementara itu, Nasution (2023) menjelaskan bahwa metode kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dibandingkan pengukuran angka atau hubungan antarvariabel.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber terpercaya, seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, *World Bank*, dan *International Monetary Fund*. Data yang digunakan meliputi jumlah pengguna dan *merchant* QRIS, volume serta nilai transaksi QRIS, tingkat inklusi keuangan, dan indikator ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta jumlah uang beredar.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan telaah dokumen dengan mengkaji laporan resmi dan kebijakan terkait implementasi QRIS dari Bank Indonesia dan instansi pemerintah. Selain itu, penelitian juga mengumpulkan artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional yang

membahas digitalisasi sistem pembayaran, inklusi keuangan, dan ekonomi makro. Data statistik terkait pengguna QRIS, volume transaksi, tingkat inklusi keuangan, dan indikator makroekonomi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema penting seperti efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan stabilitas ekonomi makro. Menurut Willig (2008), penggunaan studi literatur dan dokumen dipilih karena data yang digunakan telah tersedia dan memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipercaya.

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan cara memilih data yang relevan, menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Penelitian ini juga menggunakan *content analysis* untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara penggunaan QRIS, inklusi keuangan, dan kondisi ekonomi makro di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data periode 2020–2025 sejak QRIS diluncurkan secara nasional oleh Bank Indonesia hingga perkembangannya saat ini. Periode tersebut dipilih karena menunjukkan fase pertumbuhan signifikan QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder sehingga tidak menggambarkan pengalaman langsung pengguna maupun pelaku usaha. Kedua, penelitian tidak menggunakan metode kuantitatif sehingga hubungan sebab akibat antarvariabel tidak dapat diuji secara statistik. Ketiga, penelitian hanya berfokus pada kondisi di Indonesia dan tidak membandingkan QRIS dengan sistem pembayaran digital di negara lain. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode yang lebih beragam dan cakupan penelitian yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokratisasi Akses Keuangan dan Penciptaan Profil Kredit UMKM

Implementasi QRIS di UMKM diharapkan dapat mengatasi sejumlah hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha terutama UMKM, seperti ketergantungan pada transaksi tunai dan akses yang terbatas ke layanan keuangan formal. Namun, seperti halnya dengan penerapan teknologi baru lainnya, implementasi QRIS di Indonesia juga membawa sejumlah tantangan. Tantangan tersebut berkisar dari isu-isu teknis, seperti infrastruktur dan konektivitas, hingga tantangan sosial dan budaya yang berkaitan dengan penerimaan dan adaptasi teknologi oleh masyarakat.

Selain itu, meskipun QRIS menawarkan berbagai macam keuntungan, seperti transaksi yang lebih cepat dan data yang lebih akurat, ada kekhawatiran tentang keamanan data dan potensi *fraud*. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk memahami sepenuhnya dinamika implementasi QRIS, termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM.

Indonesia, dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, memberikan perspektif menarik tentang bagaimana teknologi digital seperti QRIS dapat diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam struktur ekonomi yang ada. Selain itu, dengan populasi yang besar dan keberagaman geografis yang luas, Indonesia menawarkan kesempatan untuk memahami bagaimana QRIS dapat diimplementasikan di berbagai konteks regional.

Oleh karena itu, mengeksplorasi dinamika implementasi QRIS di Indonesia tidak hanya relevan bagi perekonomian nasional, tetapi juga memberikan wawasan bagi negara-negara lain yang ingin mengadopsi teknologi serupa. Salah satu tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia dalam mengadopsi QRIS.

Banyak UMKM di Indonesia menghadapi kendala ketika ingin mengajukan pembiayaan ke bank maupun lembaga keuangan. Alasannya beragam, mulai dari minimnya agunan, laporan keuangan yang tidak terdokumentasi dengan baik, hingga keterbatasan data kredit. Tidak sedikit UMKM yang sudah layak secara bisnis, tetapi sulit mendapatkan modal karena tidak memiliki rekam jejak finansial yang kredibel di mata lembaga keuangan. Di era digital seperti sekarang, data dan transparansi menjadi kunci. Tanpa profil kredit yang jelas, UMKM sering dianggap berisiko tinggi sehingga pinjaman ditolak atau hanya bisa diakses dengan bunga yang tinggi. Kondisi ini menciptakan jurang pembiayaan, di mana banyak UMKM potensial kesulitan berkembang.

Fintech berbasis syariah memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan serta mempermudah proses transaksi melalui layanan keuangan yang memiliki cakupan lebih luas (Khoiriyah & Ansori, 2024). Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan

memfasilitasi hubungan antara UMKM dan lembaga perbankan atau keuangan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai produk pembiayaan yang tersedia. Skema pembiayaan mikro juga menjadi solusi relevan karena dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan modal usaha kecil dengan proses yang lebih sederhana dan persyaratan lebih fleksibel.

Berdasarkan penelusuran peneliti dari berbagai literatur terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan. UMKM dianggap belum Bankable, maksudnya adalah sektor UMKM sudah termasuk kategori usaha produktif, namun belum memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan dari lembaga perbankan yang disebabkan sektor UMKM belum sanggup menyediakan jaminan/agunan yang sesuai dengan ketentuan Bank (Soemitra et al., 2022). Karena prosedur pembiayaan di bank ada ketentuan yang harus dipedomani oleh individu yang mengajukan pembiayaan. Fungsi agunan yang diajukan lembaga keuangan merupakan alat pengaman yang mampu diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam) ketika terjadi wanprestasi atau gagal pembayaran oleh debitur (OJK, 2020).

Menkop UKM Teten Masduki menyatakan dalam acara UMKM Digital Summit 2023, kalau syarat yang harus dipenuhi UMKM diantaranya harus ada aset sebagai jaminan, niscaya akan banyak UMKM yang tidak akan dapat mengajukan pembiayaan/kredit ke perbankan. Teten Masduki menambahkan bahwa sekarang telah ada 145 negara yang sudah mengimplementasikan konsep *credit scoring*, sudah tidak menggunakan pendekatan collateral atau jaminan, dimana dalam konsep tersebut agunan dapat berbentuk aset dan lain sebagainya. Karena itu, Teten Masduki sedang menginisiasi supaya sektor UMKM Indonesia untuk *go digital*, setidaknya pencatatan keuangan sektor UMKM sudah digital (Rizky, 2023). Sebagai bukti keseriusan UMKM dalam berusaha dan karena instrumen tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan lembaga perbankan menyetujui pengajuan kredit oleh UMKM.

Akselerasi Perputaran Uang untuk Memacu Pertumbuhan Konsumsi

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui QRIS telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. QRIS memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, praktis, dan efisien hanya dengan menggunakan perangkat smartphone. Kemudahan tersebut membuat proses pembayaran menjadi lebih sederhana dibandingkan transaksi tunai maupun transfer konvensional. Menurut Bank Indonesia (2025), QRIS dirancang untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, sehingga mampu meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi masyarakat. Hingga Semester I tahun 2025, transaksi QRIS telah mencapai 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS terus meningkat dan semakin diterima masyarakat sebagai alat pembayaran digital yang praktis, cepat, dan efisien. QRIS juga mampu meningkatkan efisiensi transaksi karena terintegrasi dengan berbagai platform pembayaran digital seperti mobile banking dan dompet digital (Handayani, 2023). Selain itu, Simanullang et al. (2024) menyatakan bahwa penggunaan QRIS membantu mempercepat proses pembayaran dan mengurangi biaya transaksi, terutama pada sektor UMKM.

Kemudahan dalam penggunaan QRIS membuat masyarakat lebih aktif dalam melakukan transaksi ekonomi. Sistem pembayaran digital memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan aktivitas konsumsi menjadi lebih praktis dan fleksibel. Selain digunakan di pusat perbelanjaan modern, QRIS juga mulai digunakan oleh pedagang kecil dan pelaku UMKM sehingga jangkauan transaksi digital menjadi semakin luas. Dengan meningkatnya penggunaan QRIS, masyarakat menjadi lebih terbiasa melakukan transaksi non-tunai dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif ekonomi makro, sistem pembayaran digital seperti QRIS dapat mempercepat perputaran uang *(velocity of money)* dalam perekonomian. Perputaran uang yang semakin cepat menunjukkan meningkatnya aktivitas transaksi ekonomi di masyarakat. Semakin mudah masyarakat melakukan pembayaran, maka semakin tinggi pula intensitas konsumsi yang terjadi. Sitanggang et al. (2023) menjelaskan bahwa pembayaran digital memberikan pengaruh positif terhadap perilaku konsumsi masyarakat karena transaksi menjadi lebih mudah, fleksibel, dan efisien. Kemudahan tersebut membuat masyarakat lebih cepat dalam melakukan pembelian barang dan jasa sehingga uang beredar lebih aktif di dalam perekonomian. Meskipun transaksi digital tumbuh pesat, Bank Indonesia

(2025) menyatakan bahwa *velocity of money* di Indonesia masih relatif rendah dalam beberapa tahun terakhir, sehingga peningkatan transaksi digital diharapkan dapat membantu mendorong aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Peningkatan kecepatan transaksi juga memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM. Penggunaan QRIS membantu pelaku usaha menerima pembayaran dengan lebih cepat dan aman tanpa perlu menyediakan uang kembalian. Selain itu, transaksi digital juga mempermudah pencatatan keuangan usaha karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem. Hal ini dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola pendapatan dan meningkatkan efisiensi operasional usaha mereka.

Peningkatan konsumsi masyarakat memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam teori ekonomi makro, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2026), konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53,6% terhadap PDB Indonesia dan tumbuh sekitar 4,98%–5,11% pada tahun 2025. Peningkatan konsumsi akan mendorong permintaan agregat sehingga dapat meningkatkan produksi barang dan jasa dalam perekonomian (Mankiw, 2018). Sukirno (2020) juga menjelaskan bahwa meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat akan memperkuat pertumbuhan ekonomi karena dunia usaha terdorong untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan pasar. Dengan demikian, semakin tinggi aktivitas konsumsi masyarakat, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain meningkatkan konsumsi, penggunaan QRIS juga mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Sistem pembayaran digital membantu menciptakan transaksi yang lebih modern, transparan, dan efisien. Dengan meningkatnya penggunaan QRIS, aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih terintegrasi dengan sistem keuangan digital nasional. Transformasi digital dalam sistem pembayaran juga mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi keuangan di era modern. Meskipun demikian, penggunaan QRIS masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat dan keterbatasan akses internet di beberapa daerah. Namun, seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan dukungan pemerintah terhadap digitalisasi ekonomi, penggunaan QRIS diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang. Oleh karena itu, QRIS tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan percepatan perputaran uang dalam perekonomian.

Transparansi Transaksi Digital dalam Menekan Ekonomi Bayangan (Shadow Economy)

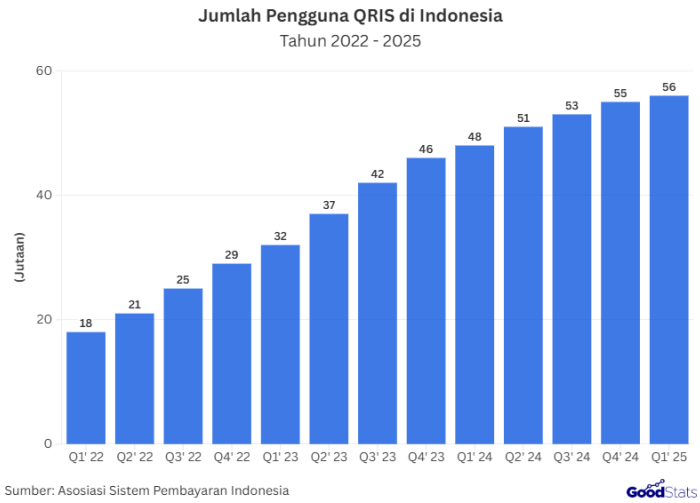
Transformasi digital dalam sistem pembayaran telah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan transparansi ekonomi di Indonesia. Perkembangan penggunaan pembayaran digital, khususnya melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem tunai menuju sistem non-tunai yang lebih tercatat dan terintegrasi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam menekan praktik shadow economy atau ekonomi bayangan yang selama ini berkembang melalui transaksi informal dan tidak terdokumentasi secara resmi.

Ekonomi bayangan (shadow economy) di Indonesia diperkirakan mencapai 8,3%–10% dari PDB menurut data PPATK yang dirujuk DJP. Hal ini merupakan salah satu tantangan struktural terbesar yang dihadapi Indonesia dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Ekonomi bayangan merupakan aktivitas ekonomi yang disembunyikan, tidak tercatat secara resmi, dan sulit terdeteksi oleh otoritas pajak, sehingga luput dari pengenaan pajak. Pemerintah melalui Nota Keuangan dan RAPBN 2026 secara tegas menyatakan bahwa meningkatnya *shadow economy* merupakan salah satu tantangan utama dalam pencapaian target penerimaan perpajakan, sebagai konsekuensi dari perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada era digitalisasi dan perluasan sektor informal.

Salah satu faktor utama yang memungkinkan ekonomi bayangan bertahan adalah dominasi transaksi tunai. Aktivitas shadow economy sangat bergantung pada pembayaran tunai karena transaksi jenis ini sulit dilacak dan tidak meninggalkan jejak digital. Lonjakan permintaan uang kartal dalam suatu negara bahkan sering dijadikan indikator tidak langsung dari tumbuhnya ekonomi bayangan. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa shadow economy di Indonesia memiliki karakteristik khas

berupa dominasi usaha mikro dan kecil yang tidak terdaftar, transaksi tunai, kurangnya kepatuhan regulasi, serta minimnya perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerjanya. Kondisi ini mendorong urgensi hadirnya sistem pembayaran yang mampu membawa transaksi informal ke dalam ekosistem keuangan yang terdokumentasi dan termonitor secara real-time.

Implementasi QRIS secara bertahap mengubah ekuilibrium ini dengan memfasilitasi migrasi dari transaksi tunai yang buram menuju ekosistem digital yang transparan. Berbeda dengan pertukaran fisik uang kertas, setiap perpindahan dana melalui instrumen QRIS akan terekam secara presisi di dalam basis data Penyelenggara Jasa Pembayaran dan terhubung dengan infrastruktur pengawasan Bank Indonesia berapapun nominalnya. Semua transaksi tercatat secara digital, sehingga pelaku usaha bisa lebih mudah melacak pemasukan dan pengeluaran bisnis, risiko kecurangan atau kesalahan pencatatan berkurang, dan pemerintah pun lebih mudah memantau perputaran uang serta penerima an pajak, sehingga perekonomian Indonesia menjadi lebih transparan dan akuntabel.



Gambar 1. Jumlah Pengguna QRIS di Indonesia Tahun 2022-2025

QRIS membuka akses sistem keuangan formal bagi segmen masyarakat yang selama ini termarginalisasi, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung sektor informal. Hal ini tercermin dari tren peningkatan pada Gambar 1, di mana hingga kuartal I 2025, pengguna QRIS telah mencapai 56,3 juta dengan volume 2,6 miliar transaksi, dan sebagian besar merchant QRIS merupakan pelaku UMKM sebanyak 38,1 juta. Pertumbuhan ini membawa implikasi nyata bagi akses pembiayaan formal, transaksi yang terekam secara real-time memberi kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan usaha, dan data arus kas yang tercatat dari transaksi QRIS bisa menjadi dasar bagi perbankan dan lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit, sehingga pelaku usaha kecil memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan formal yang selama ini menjadi tantangan utama. Peningkatan penggunaan transaksi digital turut didukung oleh membaiknya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan SNLIK 2024 yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

Pada perspektif makroekonomi, QRIS tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembayaran digital, tetapi juga sebagai infrastruktur strategis yang mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 menegaskan bahwa QRIS merupakan elemen utama dalam strategi digitalisasi sistem pembayaran nasional karena menyediakan standar kode QR yang terintegrasi dengan berbagai penyedia layanan pembayaran. Integrasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, interoperabilitas, dan efektivitas transaksi keuangan digital di Indonesia. Selain itu, pengembangan infrastruktur pembayaran digital melalui QRIS, SNAP, dan BI FAST dilaksanakan secara selaras dengan tujuan menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran nasional.

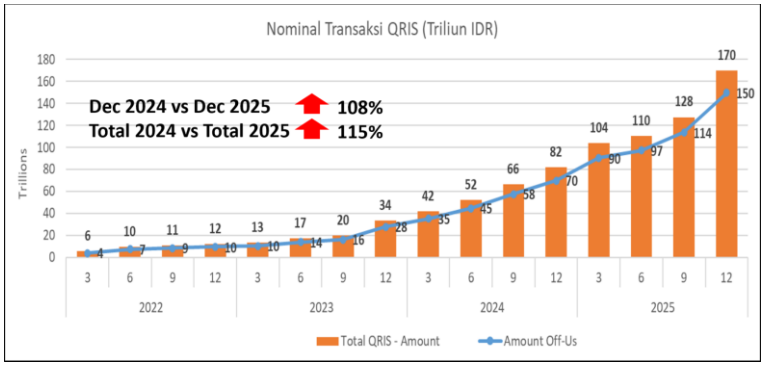
Implementasi QRIS dalam kerja sama pembayaran lintas negara bersama Malaysia, Thailand, dan Singapura turut memperluas peran strategis QRIS dalam konteks stabilitas makroekonomi regional. Skema pembayaran lintas batas tersebut memungkinkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap mata uang global, khususnya dolar Amerika Serikat. Kondisi ini dinilai mampu memperkuat ketahanan sistem keuangan, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendukung integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Dengan demikian, implementasi QRIS menunjukkan peran ganda yang saling berkaitan dalam mendukung transformasi ekonomi digital. Di satu sisi, QRIS berkontribusi dalam menekan aktivitas ekonomi bayangan melalui proses formalisasi dan pencatatan transaksi yang lebih terstruktur. Di sisi lain, perluasan penggunaan QRIS turut mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat yang menjadi salah satu prasyarat penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Data transaksi yang dihasilkan melalui sistem QRIS juga memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memperluas basis informasi ekonomi, khususnya dalam mengidentifikasi potensi penerimaan negara dari sektor informal yang sebelumnya sulit terdeteksi. Selain itu, tersedianya data transaksi digital yang lebih akurat dan terdokumentasi turut mendukung terbentuknya ekosistem keuangan digital yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pemanfaatan Data Transaksi bagi Efektivitas Kebijakan Moneter

Di era ekonomi digital yang berkembang sangat cepat, pemanfaatan data transaksi menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan seperangkat instrumen yang digunakan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan besaran moneter, seperti jumlah uang beredar, uang primer, kredit perbankan, serta tingkat suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi makro (Indana Zulfa, 2022). Dalam kondisi tersebut, kualitas serta kecepatan memperoleh data menjadi faktor yang semakin penting dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan jejak data transaksi dalam jumlah besar dan bersifat *real-time*. Data transaksi tersebut tidak hanya menggambarkan perilaku konsumsi masyarakat, tetapi juga memuat informasi penting mengenai dinamika inflasi, peredaran uang, preferensi likuiditas, hingga tekanan harga pada berbagai sektor ekonomi. Adanya teknologi digital dan pemanfaatan analisis big data turut memperkuat kebijakan moneter berbasis data *real-time*, karena data yang diperoleh mampu memberikan gambaran kondisi ekonomi secara lebih akurat dan terkini. Dengan demikian, bank sentral dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam mengendalikan inflasi, suku bunga, serta likuiditas ekonomi (Asnawi Ishak, 2023).



Transaksi pembayaran digital menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bank Indonesia mencatat bahwa volume transaksi QRIS sepanjang tahun 2025 mencapai 15,51 miliar transaksi atau meningkat sebesar 148,54% secara tahunan (*year on year*/yoy). Selain itu, nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh sebesar 186,08% (yoy) hingga mencapai Rp24,97 triliun, dengan jumlah pengguna sebanyak 43,44 juta serta jumlah merchant mencapai 29,63 juta yang mayoritas berasal dari sektor UMKM.

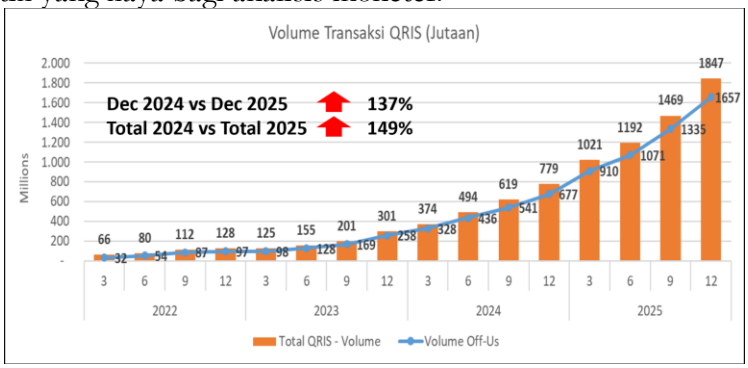
Indonesia telah mengembangkan infrastruktur pembayaran digital yang terintegrasi sebagai fondasi dalam pengumpulan data transaksi yang lebih luas, sistematis, dan terstruktur. Sampai dengan tahun 2022, Bank Indonesia berhasil menghadirkan tiga inovasi utama dalam digitalisasi sistem pembayaran, yaitu QRIS *(Quick Response Code Indonesian Standard)*, SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran), dan BI-FAST (Bank Indonesia Fast Payment System) sebagaimana dijelaskan oleh Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2022). Kehadiran ketiga instrumen tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi keuangan, tetapi juga menyediakan sumber data transaksi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung analisis serta perumusan kebijakan moneter.

Lebih lanjut, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang merupakan kelanjutan dari BSPI 2025 menegaskan kembali posisi bank sentral dalam menjaga kelancaran peredaran uang, efektivitas kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Dalam dokumen tersebut, salah satu sasaran utama yang ingin dicapai adalah peningkatan efisiensi serta percepatan transaksi pada sistem pembayaran ritel maupun grosir. Hal ini tercermin dari semakin luasnya implementasi dan penggunaan QRIS serta BI-FAST di berbagai sektor ekonomi (Bank Indonesia, 2024).

Pertumbuhan transaksi digital di Indonesia mencatatkan angka yang spektakuler dalam beberapa tahun terakhir, dan karenanya menghasilkan volume data yang semakin besar untuk dimanfaatkan. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mencatatkan pertumbuhan sebesar 226,54 persen secara year-on-year pada triwulan II-2024, dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah *merchant* 32,71 juta (Gubernur BI Perry Warjiyo, Konferensi Pers RDG BI, 17 Juli 2024). Pada akhir Oktober 2024, pengguna QRIS telah meningkat menjadi 54,1 juta dengan 34,7 juta *merchant*.

Perkembangan ini semakin mengakselerasi di tahun 2025. Berdasarkan data yang tersedia, sepanjang 2024 volume transaksi QRIS tumbuh 175,2% year-on-year, dan pada April 2025 volume transaksi QRIS nasional meningkat 154,86% *Year-On-Year* dengan total transaksi digital menyentuh 3,79 miliar transaksi (ASPI, 2025). Nilai total transaksi QRIS sepanjang 2024 tercatat mencapai ratusan triliun rupiah, dari hanya Rp8,2 triliun pada 2020, menjadi Rp695,9 triliun pada 2024 (ASPI, 2025).

Dari sisi instrumen lainnya, Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia triwulan III-2023 mengungkapkan pencapaian penting: nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp116,54 triliun, sedangkan transaksi QRIS sendiri melonjak hingga Rp56,92 triliun (Bank Indonesia, 2023). Data-data ini menjadi basis statistik yang kaya bagi analisis moneter.



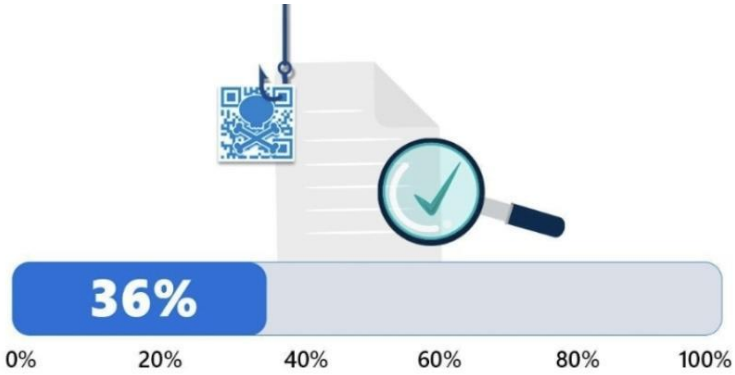
QRIS sebagai infrastruktur pembayaran nasional yang telah terstandarisasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana pembayaran digital, tetapi juga berperan sebagai sistem penghimpun data transaksi yang lengkap dan terintegrasi. Dalam sistem keuangan, bank sebagai lembaga intermediasi sekaligus jalur utama transmisi kebijakan moneter dituntut untuk melakukan transformasi melalui inovasi *digital banking* secara menyeluruh atau *end-to-end* (Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2022). Melalui QRIS, berbagai data transaksi dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk melihat pola konsumsi masyarakat, persebaran aktivitas ekonomi antarwilayah, hingga kondisi segmen usaha tertentu yang memerlukan perhatian dalam perumusan kebijakan moneter.

Selain itu, pengembangan QRIS *Cross-Border* yang saat ini telah terhubung dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand serta direncanakan diperluas ke Korea Selatan, Jepang, China, dan Uni Emirat Arab (Bank Indonesia, 2024) turut menghadirkan sumber data transaksi lintas negara yang semakin luas. Data tersebut dapat menjadi pendukung penting dalam pengelolaan nilai tukar serta pelaksanaan kebijakan moneter eksternal.

Tantangan Struktural dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan dan Stabilitas Makroekonomi

Salah satu tantangan paling fundamental dalam memperluas inklusi keuangan digital di Indonesia adalah ketimpangan infrastruktur telekomunikasi yang masih mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia secara nasional mencapai 79,5%, namun angka tersebut menyimpan ketimpangan signifikan dimana penetrasi di perdesaan hanya berada di kisaran 74%, sementara daerah yang dikategorikan sebagai 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) bahkan hanya mencapai sekitar 67,6%. Kondisi ini diperkuat oleh temuan survei APJII dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo yang menunjukkan bahwa sekitar 82,6% penduduk di daerah tertinggal telah mendapatkan akses internet pada tahun 2024, dari total populasi sekitar 9,8 juta orang yang tinggal di wilayah tersebut. Artinya, lebih dari 1,7 juta warga di daerah tertinggal sama sekali belum terhubung. Keterbatasan jaringan internet menyebabkan penggunaan layanan keuangan digital seperti QRIS, mobile banking, maupun dompet digital belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain kendala infrastruktur, rendahnya literasi digital juga menjadi hambatan serius dalam mendukung stabilitas sistem pembayaran digital. Banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan digital, namun belum memahami aspek keamanan transaksi secara menyeluruh. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang pertama kali dilaksanakan bersama BPS dan OJK mencatat bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia pada tahun 2024 sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%. Perbedaan antara kedua angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan atau produk keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami cara penggunaan, manfaat, maupun risikonya. Kondisi ini dikenal sebagai *inclusion without understanding*, yaitu ketika akses keuangan meningkat lebih cepat dibandingkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan itu sendiri. Rendahnya tingkat literasi keuangan digital pada masyarakat menengah ke bawah juga membuat mereka lebih rentan menjadi korban berbagai bentuk penipuan digital. Kurangnya pemahaman mengenai keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, serta cara mengenali modus penipuan menyebabkan banyak pengguna mudah terjebak dalam praktik kejahatan siber. Selain itu, munculnya berbagai kasus kebocoran data pribadi pada layanan keuangan digital semakin meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan penggunaan layanan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat agar perlindungan konsumen dapat terjamin serta risiko penyalahgunaan data dan penipuan digital dapat diminimalkan. Di sisi lain, masyarakat di wilayah perdesaan yang sebenarnya lebih membutuhkan akses layanan keuangan formal justru memiliki tingkat pemahaman dan akses keuangan yang lebih rendah. Kondisi tersebut menggambarkan masih adanya kesenjangan dalam pemerataan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.



Gambar 2. Rendahnya Tingkat Keberhasilan Identifikasi/ Pelaporan Kasus Penipuan Digital (QR Fraud/Scam)

Bank Indonesia (BI) mencatat nominal transaksi digital melalui QRIS mengalami pertumbuhan hingga 194,0% secara tahunan (*year-on-year*) pada April 2024. Ironisnya, pertumbuhan yang luar biasa ini berjalan beriringan dengan lonjakan penipuan digital. Menurut data gabungan dari BI dan OJK,

insiden penipuan QR Code melonjak pesat, menandakan bahwa pelaku kejahatan semakin cerdik menyasar celah dalam pembayaran digital. OJK mencatat total kerugian terkait *scam* dan *fraud* termasuk *QR fraud* mencapai Rp2,5 triliun dari 155 ribu aduan antara tahun 2022 hingga kuartal I 2024 dan hanya 36% dari insiden tersebut yang berhasil diidentifikasi dan dilaporkan dengan akurat oleh para penerima. Modus yang paling banyak terjadi adalah *sticker swapping*, yakni penempelan stiker QRIS palsu di atas kode QR asli milik pedagang. Pada Oktober 2025, sejumlah pedagang di pujasera dekat Telkom University di Bandung mengalami kerugian hingga jutaan rupiah akibat penempelan stiker QRIS palsu. Pelanggan yang merasa telah membayar dengan benar ternyata justru mengirimkan dana ke rekening pelaku, sementara saldo pedagang tidak bertambah. Kasus serupa sebelumnya terjadi di lingkungan tempat ibadah pada April 2023, seorang pelaku menempelkan stiker QRIS palsu di 38 titik masjid di Jakarta, termasuk Masjid Istiqlal. Dari sisi teknis, kerawanan QRIS palsu didorong oleh karakteristik teknologinya sendiri. QR Code sederhana dapat dicetak dan ditempel dalam hitungan menit tanpa perbedaan visual yang nyata dibandingkan kode aslinya. Hal ini diperparah oleh minimnya verifikasi aktif dari pengguna sebelum melakukan pembayaran. Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024 memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, namun masalah utama terletak pada rendahnya literasi digital, belum jelasnya arsitektur kelembagaan pengawas, serta beban implementasi yang dianggap berat oleh pelaku usaha kecil.

Tantangan-tantangan struktural di atas tidak hanya berdampak pada tataran mikro individu, melainkan juga memiliki konsekuensi makroekonomi yang perlu diantisipasi. Pertama, ketimpangan infrastruktur digital menyebabkan penyaluran kebijakan fiskal dan moneter belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, efektivitas berbagai stimulus ekonomi yang dirancang pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif menjadi kurang maksimal. Kedua, meningkatnya kasus penipuan dalam transaksi keuangan digital dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai. Jika kondisi ini terus terjadi, masyarakat akan cenderung ragu menggunakan layanan pembayaran digital, sehingga dapat menghambat upaya pemerintah dalam membangun ekosistem *cashless society* yang lebih efisien, aman, dan transparan. Data World Bank (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang membangun infrastruktur publik digital yang interoperabel mengalami penurunan biaya transaksi keuangan hingga 70% dan peningkatan inklusi keuangan lebih dari 40% dalam lima tahun. Indonesia memiliki potensi mencapai lompatan serupa, namun hanya dapat terwujud apabila tantangan kesenjangan infrastruktur, literasi keuangan, dan keamanan digital diselesaikan secara simultan dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan sektor swasta.

KESIMPULAN

Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) menunjukkan peran yang krusial dan memberikan efek yang signifikan serta beragam pada perekonomian Indonesia. Hal ini mencakup pembaruan akses finansial untuk UMKM melalui penciptaan jejak transaksi digital yang bisa dipakai sebagai dasar penilaian kredit, sehingga memudahkan pengambilan pembiayaan formal, percepatan pergerakan uang yang mendukung peningkatan konsumsi dan pertumbuhan PDB, pengurangan aktivitas ekonomi bayangan dengan melakukan formalitas terhadap transaksi yang sebelumnya tidak tercatat secara sistematis dan transparan, serta penyediaan data transaksi secara *real-time* dalam skala besar yang menguatkan efektivitas pengambilan keputusan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Namun, manfaat yang ada belum tersebar secara merata dan inklusif akibat adanya tantangan struktural yang terus berlanjut, yaitu perbedaan infrastruktur digital antara kota dan daerah tertinggal, kurangnya pemahaman literasi keuangan yang menyebabkan fenomena *inclusion without understanding*, serta meningkatnya risiko terhadap kejahatan siber dan penipuan digital yang dapat mengancam kepercayaan publik terhadap ekosistem pembayaran digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pengatur, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan edukasi literasi keuangan, serta memperkuat perlindungan data dan keamanan sistem pembayaran.

REFERENCES

Akselerasi inklusi keuangan dengan infrastruktur publik digital. (2025, Agustus 7). Dr.Aswin Rivai.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia [ASPI]. (2022). Laporan Perkembangan Standar QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan Interoperabilitas Nasional. Jakarta: ASPI.

Atarwaman, R., Gainau, P. C., Muriany, W. N. C. (2023). Pengaruh Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan UMKM Pengguna QRIS. Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO).

Badan Pusat Statistik. (2026). Produk Domestik Bruto Indonesia 2026. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Indonesia 2025. Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. (2023). QRIS Antarnegara: G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments.

Bank Indonesia. (2024, Juli 17). Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Triwulan II-2024 — Pernyataan Gubernur Perry Warjiyo.

Bank Indonesia. (2025). Statistik Sistem Pembayaran QRIS 2025. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2025). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Jakarta : Bank Indonesia.

Choerudin, A., Hasibuan, S., & Setyawati, D. (2022). Kendala aksesibilitas pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari lembaga keuangan. Aksioma: Jurnal Pendidikan Matematika, 11(2), 123-135.

Dampak Nyata BSPI 2025: Mendorong Era Baru Pembayaran Digital. (2024). Program Studi Ekonomi Pembangunan, ULM.

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. (2022). Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Sistem Pembayaran Digital. Masalah-Masalah Hukum, 51(3), 271–286.

Haikal, F. M., Murtiana, S., & Haetami, H. (2025). Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Strategies For Empowering Small And Medium Enterprises to Boost Indonesia's Economic Growth. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 5(6), 1727-1736.

Handayani. (2023). Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah.

Humphrey, D. B. (2021). Electronic Bill Payment and Economic Efficiency in Banking Systems. Journal of Payments Strategy & Systems, 15(2), 112-124.

Komariyah, F., & Annisah. (2025). Peran FinTech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Era Ekonomi Digital. Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences, 3(4), 238–243. https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i4.204

Listiyono, H., Sunardi, S., Wahyudi, E. N., & Diartono, D. A. (2024). Dinamika implementasi QRIS: Meninjau peluang dan tantangan bagi UMKM Indonesia. IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika, 8(2), 120-126

Mankiw, N. G. (2018). Macroeconomics (10th ed.). New York: Worth Publishers.

Mankiw, N. G. (2018). Principles of Economics. Boston: Cengage Learning.

Membidik Shadow Economy, Jalan Baru Menggenjot Penerimaan Pajak. (2025, September 4). Rianto Abimail, SE, SH, MAk, Ak, CA, CPA, Asean CPA, FCPA (Aust.), BKP, CMed,CRA, CPCLE, CFI.

Menjawab Tantangan Transformasi Digital demi Inklusi Keuangan Aman Baca artikel CNBC IMenjawab Tantangan Transformasi Digital demi Inklusi Keuangan Aman. (2025, September 21). Khoirul Anam, CNBC Indonesia.

Munthoharoh, A., & Hayon, P . P. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Keputusan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Pada UMKM. Papsel Economic Journal, 2(3).

Muspawi, M. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendekatan Deskriptif. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasution, S. (2023). Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Jakarta : OJK.

Pangestika, Z. N., Putri, D. K., Angelica, S. F., Nuryana, I., & Nihayah, D. M. (2025). Systematic Literature Review: Persepsi Penggunaan Qris Sebagai Peningkatan Efektivitas Alat Pembayaran Dan Sistem Keuangan Digital. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)

Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, January 30). Kemenko Perekonomian.

Pemerintah Fokus Berantas Shadow Economy Demi Kejar Target Pajak 2026. (2025, Agustus 18).

QRIS Melonjak Pesat, BI Perkuat Strategi Digitalisasi Pembayaran Nasional hingga Lintas Negara. (2026, Februari 17). EpochTimeId.

Rachman, A., Julianti, N., & Arkoyah, S. (2024). Challenges and Opportunities for QRIS Implementation as a Digital Payment System in Indonesia. EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat. (2025, May 2). OJK.

Simanullang, J., Sinaga, R., & Simangunsong, H. (2026). Dampak Efisiensi Aplikasi QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Era Digital. PRINSIP : Portal Riset & Inovasi Sistem Perangkat Lunak

Siregar, G. N. Y., Hutagalung, M. I. J., & Nduru, M. P. (2021). Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Masa Depan Transaksi Keuangan (Studi pada QRIS). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis

Sitanggang, A. S., Salsabila, K. A., Qosamah, S., Azhar, M. F., & Saputro, N. K. (2024). Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Berbasis Qris terhadap Pelaku UMKM. Jurnal Pendidikan

Sukirno, S. (2020). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Waspada Modus Penipuan QRIS. Kenali Ciri dan Cara Mencegahnya. (2025, Juni 21). Myesha Fatina Rachman.

Willig, C. (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology (2nd ed.). Berkshire: Open University Press.

World Bank. (2022). Digital Financial Inclusion and Economic Development. Washington, DC: World Bank.